

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA.
- Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Penerbit Thafia Media.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Makara, Mohammad Taufik, dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahmad, Riadi Asra, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Simanjutak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soemarso, 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Umraty Hengki Wijaya, 2020, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yuntho, Emerson, dkk, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Serang.

B. Jurnal

Alamri, Hadi, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, Jan-Feb 2017, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Ali, Mahrus, “Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol. 21, Januari 2014: 43-60, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.

Amania, Nila, “Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Syariati Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, Vol. II, No. 02, November 2016, Wonosobo: Fakulras Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an.

Aryaputra, Muhammad Iftar, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, “Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara” Dalam Perkara Korupsi”, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 1, 2017, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Astuti, Chandra Ayu dan Anis Chairi, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2015, Semarang: Universitas Diponegoro.

Atmojo, Bagus Priyo, Umar Ma'ruf, dan Djauhari, “Eksistensi Penentuan Kerugian keuangan negara dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, Desember 2017, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal*

Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi 1, Juni 2020, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Dahlan, “Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Dilaga, Auria Patra, “Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 1, Januari 2013, Sem Muhammad Taufik Makarao dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fadhlurrahman dan Mohd. Din, “Kualifikasi Ahli dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, Banda Aceh: Fakultas Hukum Univesitas Syah Kuala.
- Fanhar, Frisca Tyara M, “Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, *Jurnal Corruptio*, Vol. 01, Issue 2, July-December 2020, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Fatah, Abdul, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Fatah, Abdul, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No 1, Tahun 2017, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ferdian, R. Bayu, Mohd. Din, dan M. Gaussyah, “Penetapan Kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Law Journal*, Vol. 2, No. 3, Desember 2018, Banda Aceh: Fakultas Hukum Syah Kuala
- Firdausi, Firman dan Asih Widi Lestari, “Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif”, *Jurnal Reformasi*, Vol. 06, No.1, 2016, Malang: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tribhuana Tungadewi
- Hafidz, Jawade, “Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia”,

Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

- Hamdi, Syabatul, Suhaimi, dan Mujibussalim, “Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, November 2013, Banda Aceh: Universitas Syah Kuala
- Hasan, Astuti, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No.2, Feb 2016, Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Hussain, Ikhwan, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dan Surat dari Instansi yang Berwenang Menghitung Kerugian keuangan negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Poenale*, Vol. 5, No. 5, 2017, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Khalimi dan Susanto, “Kedudukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (bumn) Persero dalam Rangka Menghitung Kerugian keuangan negara”, *Jurnal Statrechts*, Vol. 1, No. 1, 2017, Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
- Kusuma, Dimas Prasanto, “Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian keuangan negara dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.3, No. 6, 2020, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mu'allifin, M. Darin Arif, “Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 2, November 2015, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
- Nasution, Krisnadi, “Penggunaan Keterangan Perusahaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No. 2, Agustus 2019-Januari 2020, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945
- Nugroho, Bastianto, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap.” *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No.1, Januari 2017, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Permatasari, Anggun Indah, Pujiyono, Henny Juliani, “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2017, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Pontoh, Andini Rahmayanti, “Tugas dan Wewenang BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No.1, Jan-Mar 2013, Manado: Universitas Sam Ratulangi

- Prasetya, Avarakha Denny dan Kristiyadi, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, hlm. 41arang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Pujiyono, Alcadni Wijayanti, dan Bambang Dwi Baskoro, “Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No, 4, Tahun 2012, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Rampengan, Mahdalena Deisi, “Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II, No. 3, April 2014, Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Rosyadi, Muhammad Imron, “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara,” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.
- Samurine, Claudia Aprlia, “Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 3, No. 3, Maret 2019, Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Sari, Eka Nurmala dan Sapta Lestari, “Pengaruh Kompetensi dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, 2018, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Sari, Mayla Pramono, “Analisis Perbandingan SSPAP, IAS, dan SPKN”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, Maret 2010, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Setadi, Wicipto, “Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, November 2018, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran Jakarta
- Sirait, Adi Syahputra, “Kedudukan dan Efektivitas Justice Colaborator di dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol 5, No. 2, Juli-Desember 2019, Padang Sidempuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan,
- Umboh, Prisco Jeheskiel, “Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2, No. 2, April-Juni 2003, Manado: Universitas Sam Ratulangi

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- _____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- _____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- _____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- _____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI-2013
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- _____, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- _____, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- _____, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian Keterangan Ahli
- _____, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

D. Internet

- IAI, "Tentang IAI", diakses dari <https://web.iaiglobal.or.id/Profil-IAI/Tentang%20IAI> pada tanggal 1 Juni 2021

IKAI, “CACP-Certification In Audit Committee Practices”, diakses dari <https://www.ikai.id/program/program-sertifikasi/cacp-certification-in-audit-committee-practices/> pada tanggal 1 Juni 2021

